

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Anggara, Sahya. *Administrasi Kepegawaian Negara*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Agus, Dede. *Hukum Ketenagakerjaan*. Banten: Dinas Pendidikan. 2011
- Hartini, Sri *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ma'ruf, J. Jasman. *Assesment Center*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama .2018.
- Muhammad, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Pasolong, Harbani (Terjemah Kahar Masyhur). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Rudito, Bambang. *Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Kencana. 2016
- Thoha, Miftah. *Manajemen Kepegawaian*. Jakarta: Prenamedia group. 2005.

### 2. JURNAL/UU/PP

- Anggun, Rike Artisa. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) review terhadap UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Pembangunan dan kebijakan public*. Vol. 06. No. 01. 2015
- Ayuningtyas, Nurmalita Harahap. *Perlindungan Hukum bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa*

*Kepegawaian Pasca Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Yuridis. Vol.3. No.2. 2016.*

Handayani, Sri. *Faktor Determinan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negaradi Kabupaten Biak Numfor. Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2016*

Juliani, Henny. *Diskresi dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja. Jurnal Administrative law & Governance. Vol. 2. No. 2. 2019*

Kartika, Febri Sari. *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pemerintah Daerah dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) studi di Kantor DPRD Lombok Barat dan sekretaris Derah Lombok Barat, Jurnal Ilmiah, 2018.*

Nuraffa Ince Arfiani. *Analisis Terhadap Status Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.4. 2016*

Putri Wulandari, Ida Ayu. *Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian PPPK berdasrkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum.2019.*

- Rakhmawanto, Ajib *Analisis Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang dalam pembinaan ASN di Instansi Pemerintah Di: Kab.Lampung, Kota Cilegon, dan Kota Kediri*. Jurnal Bina Praja. 2015.
- Surjana, Ondang. 2016. *Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) dalam sistem kepegawaian Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan diakses pada 1 Oktober 2019 pukul 10:15 WIB.
- Wahidin, Herman. *Implikasi Penetapan Tewas Dalam Perlindungan dan Pemberhentian PNS*. 2019
- Widada, Trisna. *Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan implikasinya terhadap ketahanan masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)*. Jurnal Ketahanan Nasional. Volume 23. 2017
- Widhi, Tri Ayusari. *Pengangkatan PPPK dan Implikasinya Terhadap Hak dan Kewajiban Kepegawaian (Studi di Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Soedirman Law Review. Volume 2. No. 12. 2020
- UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai  
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin PNS



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-20903233 fax. 0254-209022 e-mail: syariah@uimbanten.ac.id.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

**NOMOR : 252 TAHUN 2019**


**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

- Membaca** : Surat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 29 Januari 2020 dinyatakan lulus:  
A. n. **NIA ZULFAH NURMALIA**  
NIM : **161120018**
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;  
2. Bahwa saudara **Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.** dan saudara **Hilman taqiyudin, M.H.I.** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;  
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.  
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1.  
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. B.II/3/54242/2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2017-2021.  
8. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 97/Un.17/B.III.2/KP.07.6/10/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2017-2021.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor UIN SMH Banten Nomor 150 Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2019/2020.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Mengangkat saudara **Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.** sebagai Pembimbing Utama dan saudara **Hilman taqiyudin, M.H.I.** sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **Perlindungan PPK dalam Hukum Administrasi Kepagawain Perspektif UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.**
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;  
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di **Serang**  
pada Tanggal **4** Februari 2019

  
**Dr. H. YUSUF SULAWINATA, M.Ag.**